



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 27 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **INDRIAWAN**
2. Jabatan : **KEPALA KANTOR**
3. NHK : **663265**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.675.500.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 285 m2/187 m2 di KAB / KOTA
FAKFAK, HASIL SENDIRI Rp. 785.500.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/90 m2 di KAB / KOTA
MALANG, HASIL SENDIRI Rp. 890.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 7.300.000

1. MOTOR, HONDA MEGAPRO Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp.
4.500.000
2. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp.
2.000.000
3. MOTOR, YAMAHA CRYPTON Tahun 1999, HASIL SENDIRI Rp.
800.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ----

D. SURAT BERTAHAP Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 77.131.741

F. HARTA LAINNYA Rp. 25.000.000

Sub Total Rp. 1.784.931.741

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 1.784.931.741

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpnp.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpnp.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.